

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016 wajib dilaksanakan sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999. LAKIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategik Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Semarang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2017 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat selalu dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2017 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 15 Januari 2018

KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA SEMARANG

R. AGUS HARMUNANTO, SH

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP.19630130 198803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- A Latar Belakang
- B Gambaran Umum
- C Permasalahan Utama
- D Sistematika Penulisan LKJIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A Rencana Strategis
- B Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A Capaian Kinerja Organisasi
- B Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A Tinjauan Umum
- B Tinjauan Khusus
- C Saran

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2017 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama dari instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ada beberapa aspek pendukung lainnya yang meliputi (a) Aspek keuangan ; (b) Aspek SDM; (c) Aspek sarana dan prasarana, dan (d) Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang

Sebagaimana diketahui bersama bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Tap MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 , yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2017 diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi. Disamping itu penyusunan LKj IP dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang pada akhir tahun anggaran atau pada saat penyusunan laporan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Daerah Kota Semarang, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan operasional dan usaha penanggulangan bencana;

2. Pelaksanaan kegiatan operasional pertolongan pertama akibat bencana termasuk pula pelaksanaan pelayanan penyelamatan masyarakat;
3. Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan teknik dan operasional terhadap unit — unit Penanggulangan bencana, instansi pemerintah swasta dan masyarakat di bidang usaha pencegahan penanggulangan bencana;
4. Pelaksanaan peningkatan keterampilan tenaga sukarelawan dan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait didalam penanggulangan bencana;
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

2) Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

a. *Kepala Badan* yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

b. *Unsur Pengarah*

Unsur Pengarah terdiri dari:

a. Ketua yang dijabat oleh kepala badan, dan

b. Anggota yang berasal dari:

a. lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.

b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

c. *Unsur Pelaksana*, terdiri dari:

1) Kepala Pelaksana

2) Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan umum dan kepegawaian.

b) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan keuangan.

c) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan perencanaan dan evaluasi.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 seksi yaitu:

a) Seksi Mitigasi Bencana

Seksi Mitigasi Bencana menjalankan tugas dan fungsi menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana.

b) Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 seksi yaitu:

a) Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana

Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana.

b) Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana

Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan bencana.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 seksi yaitu:

a) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan rehabilitasi.

b) Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dan mengoordinasikan rekonstruksi

3) Sumber Daya Manusia

Data tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah personil BPBD Kota Semarang sejumlah 60 PNS yang terdiri dari :

1. Jabatan struktural eselon II sebanyak : 1 orang
2. Jabatan struktural eselon III sebanyak : 4 orang
3. Jabatan struktural eselon IV sebanyak : 9 orang

4. Staf sebanyak 46 orang

4) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang dan operasional yang dimiliki BPBD Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Alokasi Kendaraan :

No	Alokasi Kendaraan	Jumlah dan Kondisi	
		Roda 2	Roda 4
1	Sekretariat	10	2
2	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2	1
3	Bidang Kedaruratan dan Logistik	2	1
4	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2	1
5	Kebencanaan	5	8

Tabel 1.2 Data Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Jumlah
1	Meja	61
2	Kursi	79
3	Komputer	25
4	Laptop	22
5	Cabinet	13
6	Air Conditioner (AC)	29
7	Printer	18
8	Camera	23
9	TV	22
10	LCD	2

C. PERMASALAHAN UTAMA

Dengan memperhatikan permasalahan bencana saat ini dan isue yang berkembang nampaknya diperlukan suatu paradigma baru dalam kelembagaan atau unit Tim Reaksi Cepat PB (TRC). Salah satu realisasi dari nafas paradigma baru adalah perubahan orientasi visi dan misi. Sebagai masukan dalam menentukan visi adalah adanya kenyataan bahwa TRC mencakup aspek pencegahan, penanggulangan dan pembinaan / penyuluhan kepada masyarakat. Sasarannya adalah emergency dan rescue serta rehabilitasi.

Realisasi lainnya adalah peningkatan peran TRC dan peningkatan institusinya sehingga perlu dibuat unit pengurangan bencana menuju masyarakat Kota Semarang yang tangguh bencana mungkin diwujudkan melalui Kelurahan Siaga Bencana (KSB) serta membentuk Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) dimana seluruh elemen masyarakat, badan usaha serta instansi pemerintahan yang terkait dengan kebencanaan dapat saling sinergi dalam mewujudkan Kota Semarang yang tangguh akan bencana.

D. SISTEMATIKA PENULISAN LK JIP

Sistematika Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) BPBD Sleman tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi tentang penyajian singkat mengenai : Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang pengungkapan akuntabilitas kinerja diutamakan menitikberatkan pada pencapaian sasaran-sasaran organisasi.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja OPD serta langkah-langkah antisipatif yang mungkin diambil untuk mengatasi masalah yang berpotensi timbul pada masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1) Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada issue dan analisis strategis. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasarannya adalah menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan / aset Pemerintah Kota Semarang baik sebelum (pra), sedang berlangsung maupun pasca pembangunan. Dalam suasana iklim politik yang secara nasional cenderung menghangat namun kondisi keamanan dan kewaspadaan perlu kita tingkatkan, walaupun kejadian kasus bencana ada yang bias dan tidak dapat diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, pembinaan teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bencana.

2) Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan

Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan - kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang dapat meresahkan masyarakat dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan penanganan bencana, sehingga aset / angka kerugian dapat ditekan sekecil mungkin dan aset yang dapat terselamatkan dapat meningkat.

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama OPD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	5
2	Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Rasio penanganan korban bencana	100%

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja OPD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Gladi Lapang Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan Gladi Lapang	100%
		Operasional Posko Dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang	Petugas POSKO Non ASN	100%
		Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan	Penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan tim kaji cepat	100%
			Pemeliharaan Sarpras kebencanaan	100%
		Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan Bantuan Korban Bencana	Tersedianya bahan pangan logistik	100%
		Peningkatan Sdm Rescue	Pelatihan SAR	100%
		Pengelolaan Bantuan Korban Bencana	Pengiriman air bersih	100%
		Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (prb Bk)	Workshop stekholder kebencanaan berbasis komunitas dan pembentukan sekolah madrasah aman bencana	5
		Forum Prb	Optimalisasi FPRB	100%
		Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bencana	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Bencana Tahun 2016	100 %
		Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana	Terfasilitasinya Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Korban Terdampak Bencana di Kota Semarang	100%
		Rekonsiliasi Dan Resolusi Konflik	Terselenggaranya rekonsiliasi dan resolusi konflik di wilayah terdampak bencana	100 %
		Inventarisasi Dan Identifikasi Kerusakan Infrastruktur Dampak Bencana	Terinventarisirnya data kerusakan dan kerugian infrastruktur terdampak bencana	100%
		Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Bencana Tahun 2016	27
Pemulihan Kondisi Psikologis Akibat Bencana	Terselenggaranya Sosialisasi Pemulihan Psikologis Pasca Bencana di Kecamatan Semarang Utara, Tugu, Ngaliyan, Candisari dan Gajahmungkur.	100 %		
Pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana	Terselenggaranya Forum Koordinasi Dalam Penanganan pasca Bencana (terbentuk Forkom Penanganan Pasca Bencana),	100%		
2	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Kelurahan Siaga Bencana	Pembentukan Kelurahan siaga Bencana	5
		Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Sosialisasi daerah rawan bencana	100%
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana	Penyediaan Sarana Prasarana Kebencanaan	100%
		Peningkatan Sumber Daya Manusia KSB	Terlatihnya anggota KSB	22

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017			REALISASI TAHUN 2016
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah lembaga Tangguh bencana	5	5	100	0
2	Rasio penanganan korban bencana	100%	100%	100	100%

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2017	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2016
				TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	
1	SASARAN 1 : Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana	Jumlah lembaga Tangguh bencana	5	5	5	100	0
2	SASARAN 2 : Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana	Rasio penanganan korban bencana	100%	100%	100%	100	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja, oleh karenanya termasuk hasil analisis dan evaluasi terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan, dan lain-lain.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja ini paling tidak mencoba merangkum dan mencari kesesuaian antar perencanaan strategis dengan kinerjanya (vertikal), maupun manfaat dari kebijakan, program, maupun kinerja bagi pihak-pihak yang menerima manfaat, dari jasa yang diterimanya (horinsontal).

Dalam tataran operasional maka akuntabilitas kinerja berkaitan dengan implementasi strategi dan pengawasannya. Evaluasi tataran operasional ini secara mendetail dilakukan pada evaluasi kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hal penting yang perlu dilakukan adalah evaluasi dan analisis secara komprehensif dalam tataran operasional ini paling tidak akan mampu melihat keterkaitan antara kinerja dengan perencanaan strategisnya.

Oleh karena itu, dari kesimpulan hasil evaluasi perlu suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan rinci.

Disamping itu, perlu pula dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain mencakup analisis masukan keluaran (*inputs-outputs*), analisis realisasi hasil (*outcomes*) dan manfaat (*benefits*), analisis dampak (*impacts*) baik positif maupun negatif, analisis keuangan dan analisis kebijakan.

1. SASARAN 1 : Meningkatnya kapasitas mitigasi penanggulangan bencana

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2016
	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	
Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan	41,67%	66.67%	160.00%	28,79%
Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS	20,00%	20,00%	100.00%	0%
Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	70.68 %	86.66%	122.61%	66.68%

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai oleh BPBD Kota Semarang adalah berhasil meningkatkan :

- 1) Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan dari yang ditargetkan 41.67% menjadi 66.67% atau berhasil mencapai target 160%
- 2) Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS dari yang ditargetkan 20% menjadi 20% atau berhasil mencapai target 100%
- 3) Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana dari yang ditargetkan 70.68% menjadi 86.66% atau berhasil mencapai target 122.61%

2. SASARAN 2 : Meningkatnya kapasitas adaptasi bencana

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2016
	TARGET TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	
Pemenuhan sarpras penanggulangan bencana	100%	100.00%	100.00%	100%
Persentase pemenuhan bagi korban bencana	85,71%	85.71%	100.00%	85,71%
Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	86.75%	97.52%	112.41%	84,50%

Pada tahun 2017 kinerja yang dicapai oleh BPBD Kota Semarang adalah berhasil meningkatkan :

- 1) Pemenuhan Sarpras penanggulangan bencana dari yang ditargetkan 100% menjadi 100% atau berhasil mencapai target 100%

PROGRAM/ KEGIATAN YANG BERHASIL

INDIKATOR KINERJA	TAHUN2017			REALISASI TAHUN 2016
	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2017	%	
Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan	41,67%	66.67%	160.00	28,79%
Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS	20,00%	20,00%	100.00	0%
Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	70.68 %	86.66%	122.61	66.68%
Pemenuhan sarpras penanggulangan bencana	100%	100.00%	100.00	100%
Persentase pemenuhan bagi korban bencana	85,71%	85.71%	100.00	85,71%
Persentase cakupan pemulihan pasca bencana	86,75%	97.52%	112.41	84,50%

- Indikator Kinerja *Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan, Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS, Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana* tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/ kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Gladi lapang penanganan bencana
2. Operasional posko dan penanggulangan bencana kota semarang
3. Penanggulangan dan evakuasi korban bencana
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana bidang kebencanaan
5. Penyediaan logistik, obat-obatan dan bantuan korban bencana
6. Peningkatan sdm rescue
7. Pengelolaan bantuan korban bencana
8. Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas (prb bk)
9. Forum prb
10. Monitoring evaluasi dan pelaporan bencana
11. Fasilitasi pemberdayaan kehidupan sosial ekonomi dampak bencana
12. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
13. Inventarisasi dan identifikasi kerusakan infrastruktur dampak bencana
14. Pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana
15. Pemulihan kondisi psikologis akibat bencana
16. Pemulihan kembali prasarana dan sarana infrastruktur akibat bencana

- Indikator Kinerja *Pemenuhan sarpras penanggulangan bencana* tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/ kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
 1. Kelurahan Siaga Bencana
 2. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana
 3. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana
 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia KSB

PROGRAM/ KEGIATAN YANG GAGAL..... (*tidak ada*)

KENDALA/ HAMBATAN..... (*tidak ada*)

TINDAK LANJUT..... (*tidak ada*)

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam tahun anggaran 2017 secara garis besar anggaran 2017 terserap 98.06%, aspek dukungan dana yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, khususnya anggaran kegiatan beserta realisasinya adalah sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

LKJ IP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2017 yang secara umum disusun sebagai media akuntabilitas, berisikan informasi-informasi bagi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program- program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam Tahun anggaran 2017.

Dari Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Kinerja terhadap Kegiatan, Program dan Kebijakan serta pembobotan seperti yang diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2017 dikategorikan Sangat Baik.

B. TINJAUAN KHUSUS

Di BPBD Kota Semarang sudah disiapkan personil sejumlah 30 orang relawan yang semuanya merupakan tenaga lapangan untuk (SAR) yang sewaktu-waktu dibutuhkan dilapangan apabila terjadi bencana di wilayah kota Semarang selama 24 jam dan 7 orang PUSDATIN untuk update data bencana secara cepat

C. SARAN

1. Pada tahun berikutnya sangat diperlukan bantuan langsung dari BPBD Kota Semarang berupa paket material dan paket tenaga kerja untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana serta mengantisipasi dampak kerugian akibat bencana.
2. Pada tahun berikutnya, bantuan masyarakat yang terkena bencana dan atau korban bencana yang bersifat **kedaruratan** perlu ditingkatkan jumlah dan jenis bantuan **sembako** .